



IMPLEMENTASI MANAJEMEN KONFLIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SMPN 59 KOTA BANDUNG

Pramesti Salma Ihsandina Suherlan¹, Wahyu Hidayat²
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1 2}

spramesti276@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tercatat ada 6.139 jumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen konflik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Subjek penelitian ini adalah guru bimbingan konseling di SMPN 59 Kota Bandung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan terjadi hanya berbentuk kekerasan verbal yang disebabkan oleh candaan. Upaya pencegahan dilakukan dengan mengikuti pelatihan, deklarasi *Roots Day* dan membentuk tim agen perubahan di setiap kelas. Prosedur penanggulangan melalui beberapa tahap yaitu guru mata pelajaran, wali kelas, guru bimbingan konseling, dan kesiswaan. Dengan demikian, SMPN 59 mampu mengimplementasikan manajemen konflik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Kata Kunci: Manajemen konflik; pencegahan; penanggulangan; kekerasan,

ABSTRACT

According to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection in Indonesia there were 6.139 cases of violence that occurred in the home, school, and community environment. The purpose of this study was to determine the implementation of conflict management in efforts to prevent and control acts of violence within the education unit. The subject of this study is counseling teacher at SMPN 59 Bandung City. This research method used a qualitative field study approach by collecting data through interviews, observation, and documentation. The result of this study showed that violence occurred only in the form of verbal abuse caused by jokes. Prevention efforts are carried out by participating in training, the declaration of Roots Day, and forming a agent of changes' team in each class. The coping procedure goes through several stages, namely subject teacher, homeroom teachers, guidance and counseling teachers, and staff students. Therefore, SMPN 59 is able to implement conflict management in an effort to prevent and deal with acts of violence within the education sector.

Keywords: Conflict management; prevention; overcoming; violence

PENDAHULUAN

Akhir- akhir ini, tindak kekerasan marak terjadi di Indonesia. Menurut *website* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tercatat ada 6.139 jumlah kasus kekerasan, dengan jumlah 1.099 korban laki – laki dan 5.562 korban perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan menjadi hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi terulang kembali.



Tidak mungkin ada api tanpa asap. Kekerasan terjadi pasti bermula dari suatu konflik. Menurut (Tuwu, 2018:14-18) konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki pemahaman atau tujuan yang bertentangan. Apabila konflik tidak segera diselesaikan situasi tersebut bisa mengarah pada kekerasan. Konflik terbagi menjadi dua yaitu konflik tanpa kekerasan dan konflik dengan kekerasan. Menurut Dian Francis dalam (Irwandi & Endah, 2017:29-30) konflik kekerasan terjadi disebabkan oleh tiga faktor yaitu komunikasi, struktur, dan pribadi. Selain itu juga disebabkan karena perbedaan paham terhadap tujuan, norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial, maupun terhadap tindakan dalam masyarakat (Yaqinah, 2019:5). Setiap konflik yang terjadi di suatu organisasi apabila mampu mengelola manajemen konflik sebagaimana mestinya bisa mengurangi adanya pemicu kekerasan.

Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, menyebabkan matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain (Anis, 2018:134). Berdasarkan karakteristiknya, kekerasan terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu, kekerasan fisik (*physical abuse*) yang menimbulkan luka fisik, kekerasan psikis (*mental abuse*) yang meliputi penghardikan dan penyampaian kata – kata kasar, kekerasan seksual (*sexual abuse*) berupa perlakuan prakontak juga kontak seksual, kekerasan sosial (*social abuse*) seperti eksploitasi anak, dan kekerasan yang diakibatkan tradisi atau adat (Adawiah, 2015:283-284). Kekerasan tidak memandang usia, pelaku maupun korban bisa aja anak – anak bahkan orang dewasa. Kekerasan dapat terjadi di dalam rumah seperti lingkungan keluarga, dan dapat juga terjadi di luar rumah seperti sekolah dan lingkungan masyarakat.

Dilansir dari Republika (Amanda & Soraya, 2023), Kota Bandung menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi ketiga di Jawa Barat pada trimester awal tahun 2023 dilihat berdasarkan Sistem informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan, tercatat sebanyak 37 laporan kekerasan yang terjadi di Kota Bandung. Peringkat pertama diduduki oleh Kota Depok dengan 179 laporan. Peringkat Kedua diduduki oleh Kota Bogor dengan 42 laporan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 423 kasus kekerasan di Kota Bandung, hal ini dapat dikatakan sebagai wilayah dengan kasus kekerasan tertinggi di Jawa Barat.

Pada tahun 2023 di Jawa Barat sendiri, total kasus kekerasan berjumlah 433 kasus. 399 kasus diantaranya dialami oleh perempuan. Apabila dilihat dari rentang usia, 139 kasus terjadi pada kelompok usia 6-12 tahun dan 129 kasus terjadi pada kelompok usia 13-17 tahun. Bahkan menurut temuan Simfoni PPA bahwa siswa sekolah dasar (SD) merupakan yang paling banyak menjadi korban tindak kekerasan dengan jumlah 129 laporan kasus. Siswa SLTP/SMP dengan 101 laporan kasus dan SMA berjumlah 96 jumlah kasus.

Kekerasan terhadap peserta didik di satuan pendidikan adalah krisis yang mengkhawatirkan saat ini dan hanya bisa diatasi dengan melibatkan semua pihak, mulai dari orang tua/wali, pendidik, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Melalui Kemendikbud, Pemerintah telah menerbitkan regulasi tentang penanggulangan kekerasan di sekolah dalam bentuk Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Isi dari regulasi tersebut mengatur tata cara pencegahan dan penanggulangan kekerasan agar dapat



menghadirkan rasa aman pada peserta didik khususnya di lingkungan sekolah sebagai rumah kedua yang bebas dari tindak kekerasan.

Dengan demikian diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui upaya – upaya apa yang telah dilakukan sekolah dan pihak terkait dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan di sekolah sebagai bentuk implementasi manajemen konflik dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, terutama tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Adapun tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian tentang implemementasi manajemen konflik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di SMPN 59 Kota Bandung. Adapun tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui, Pertama, bentuk dan penyebab tindak kekerasan di SMPN 59 Kota Bandung. Kedua, mengetahui upaya pencegahan tindak kekerasan di SMPN 59 Kota Bandung. Ketiga, mengetahui upaya penanggulangan tindak kekerasan di SMPN 59 Kota Bandung. Keempat, mengetahui implementasi manajemen konflik di SMPN 59 Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, 2005). Penelitian ini dilakukan dengan cara holistic, menyeluruh, dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 59 Kota Bandung yang beralamat di Jalan Cicabe, Kel Jatihandap, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat. Sumber data penelitian ini adalah Guru Bimbingan Konseling SMPN 59 Kota Bandung sebagai *Key Informan*, lingkungan sekolah, dan dokumen pelengkap seperti arsip, buku, dan informasi internet. Penentuan sumber data penelitian ini didasarkan pada keterlibatan responden dengan masalah yang akan diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi terlibat, wawancara, dan menyalin dokumen disertai dengan penelitian lapangan (*field research*). Teknik wawancara yang digunakan berupa wawancara semi terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah unitisasi, pengkodean, dan penafsiran. Analisis data tersebut melalui beberapa proses, yaitu menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi, menyusun data satuan-satuan, dan pemeriksaan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan reponden, peserta didik di SMPN 59 Kota Bandung berjumlah 441 orang yang terdiri dari 244 siswa laki-laki dan 197 siswa perempuan. Peserta didik tersebut terbagi menjadi 13 rombel dengan kelas 7 berjumlah 5 rombel, kelas 8 berjumlah 4 rombel dan kelas 9 berjumlah 4 rombel. Dengan rata – rata setiap rombelnya diisi oleh 33-35 siswa. Setiap kelas memiliki konflik kekerasan yang berbeda – beda. Tindak kekerasan yang biasa terjadi di lingkungan sekolah hanya berbentuk kekerasan verbal seperti halnya saling mengejek. Hal tersebut disebabkan oleh



candaan yang berlebihan sehingga menimbulkan perasaan sensitif pada diri siswa. Upaya pencegahan yang diterapkan di sekolah adalah mengikuti *workshop* anti perundungan bagi tenaga pendidik serta sosialisasi gerakan *stop bullying* bagi siswa dari dinas pendidikan setempat. Upaya penanggulangan tindak kekerasan di sekolah adalah dengan mengintegrasikan kerja sama antara guru mata pelajaran, wali kelas, guru bimbingan konseling, dan kesiswaan.

Penyebab dan Bentuk Tindak Kekerasan

Konflik kekerasan terjadi disebabkan oleh perilaku adatif siswa yang menyesuaikan diri dalam masa peralihan dari sistem pembelajaran PTMT ke sistem tatap muka. Konflik tersebut mulanya tidak begitu terlihat sehingga guru masih belum menyadari adanya tindak kekerasan di lingkungan antar siswa. Setiap tingkat kelas memiliki konflik masing – masing. Hanya saja konflik tersebut lebih banyak ditemukan di kelas tujuh. Konflik yang terjadi di kelas tujuh berupa adanya “*circle*” atau kelompok – kelompok yang memiliki satu ketertarikan yang sama, misalnya kelompok penyuka seni, kelompok penyuka drama korea, kelompok penyuka olahraga, dsb. Adapun di kelas delapan, konflik yang biasa ditemui disebabkan oleh masa pubertas, seperti ketertarikan dengan lawan jenis. Sedangkan di kelas sembilan, konflik pribadi yang terjadi adalah mengenai sekolah lanjutan.

Bentuk kekerasan yang kerap terjadi hanya berupa kekerasan psikis (*mental abuse*) dan kekerasan verbal. Contoh dari bentuk kekerasannya adalah saling mengejek nama orang tua siswa dan mengejek anggota fisik seperti rambut ikal. Kekerasan tersebut bermula dari candaan antar siswa namun beberapa diantaranya menimbulkan sakit hati atau bawa perasaan. Sejauh ini, tidak pernah terjadi bentuk kekerasan fisik seperti perkelahian atau tawuran.

Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi (Simatupang & Abduh, 2020:5). Pencegahan tindakan kekerasan di sekolah merupakan tindakan untuk meningkatkan kesadaran warga satuan pendidikan tentang bahayanya tindak kekerasan sehingga mampu untuk mencegah terjadinya kekerasan pada peserta didik di sekolah. Upaya pencegahan di tingkat satuan pendidikan bisa dilakukan dengan cara, Pertama, menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan. Kedua, membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan. Ketiga, melakukan sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS) dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat sekitar satuan pendidikan. Keempat, Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, pekerja sosial, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas), UPT/ UPTD/P2TP2A (layanan perlindungan anak), organisasi keagamaan, pakar pendidikan, dan lembaga lain yang relevan (Effendy, 2019:53-54).

Pencegahan tindak kekerasan merupakan kewajiban semua orang di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Tanpa adanya pencegahan, tindak kekerasan bisa terjadi berulang kapan saja dimana saja. Dalam satuan pendidikan, sejak tahun 2021 pemerintah telah membuat kebijakan agar setiap lembaga sekolah mengadakan Hari Deklarasi Anti Perundungan (*Roots Day*) sebagai wujud aksi nyata dalam mencegah



terjadinya perundungan di sekolah. Program tersebut juga telah diimplementasikan di SMPN 59 Kota Bandung. Pada bulan Oktober tahun 2022, seluruh siswa dan guru menandatangani Deklarasi Anti Perundungan (*Roots Day*) di spanduk yang besar. Hal ini bertujuan sebagai komitmen antara siswa dan guru agar saling bekerjasama dalam mencegah perundungan di sekolah. Beberapa guru seperti guru BK, Kesiswaan, Staff Kesiswaan, dan wali kelas didelegasikan untuk mengikuti *workshop* pelatihan *Roots Day* dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dalam pelatihan tersebut dijelaskan mengenai kegiatan anti perundungan dan anti *bullying* di sekolah.

Implementasi dari program tersebut, SMPN 59 Kota Bandung membuat strategi khusus mencegah tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Bentuk strategi tersebut adalah dengan memilih 1-2 orang siswa di setiap kelasnya untuk dijadikan sebagai agen perubahan yang bertugas dalam menegur, mengingatkan, dan melaporkan apabila terjadi tindak kekerasan perundungan di kelas. Adanya strategi ini membantu para guru untuk memantau kondisi kelas meskipun ketika tidak ada guru di dalamnya. Selain itu, sekolah memberikan layanan konseling bagi siswa yang membutuhkan seperti bimbingan konseling pribadi, sosial, dan karir. Pelaksanaanya bisa siswa menghampiri guru bimbingan konseling secara pribadi atau guru bimbingan konseling yang mendatangi setiap kelas ketika ada jam kosong.

Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan

Penanggulangan merupakan suatu cara untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif. Satuan Pendidikan wajib memberikan pertolongan terhadap peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Selain itu juga wajib menjamin hak peserta didik yang terlibat dalam tindak kekerasan untuk tetap mendapatkan pendidikan dan mendapatkan perlindungan hukum. Untuk mencapai proses penanggulangan tindak kekerasan yang sukses, diperlukan kerjasama seluruh pihak sekolah, orangtua, dan masyarakat sekitar.

Permendikud No. 82 Tahun 2015 pasal 10 mengemukakan upaya penanggulangan tindak kekerasan yaitu, Pertama, wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan; Kedua, wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban atau pelaku; Ketiga, wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik; Keempat, menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan; Kelima, berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan; Keenam, wajib memberikan rehabilitas terhadap peserta didik yang mengalami tindak kekerasan.

Adapun prosedur penanggulangan tindak kekerasan di SMPN 59 Kota Bandung adalah penanganan pertama oleh guru mata pelajaran yang sedang mengajar apabila tindak kekerasan terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kedua, apabila permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh guru mata pelajaran maka akan ditangani oleh wali kelas. Ketiga, permasalahan akan ditangani oleh guru bimbingan konseling untuk ditindaklanjuti apabila masih juga belum terselesaikan. Pada tahap ini pelaku dan korban akan mendapatkan bimbingan dan layanan sampai permasalahan terselesaikan. Keempat, tahap terakhir dalam penanganan tindak kekerasan dilakukan oleh kesiswaan. Apabila



memasuki tahap ini, maka sudah diberlakukannya vonis seperti skorsing, hitam diatas putih, dan menulis surat perjanjian di atas materai.

Upaya penanggulangan tindak kekerasan tersebut telah terimplementasikan dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan sedikitnya kasus kekerasan yang terjadi di sekolah serta tidak ditemukannya kekerasan fisik ataupun kekerasan yang sampai melibatkan pihak berwajib. Dengan demikian sekolah mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didiknya.

Implementasi Manajemen Konflik Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di SMPN 59 dapat terimplentasikan dengan mengadopsi fungsi – fungsi manajemen konflik. Fungsi perencanaan diimplementasikan dengan membuat program, strategi pencegahan, dan prosedur penanganan. Fungsi pengorganisasian diimplementasikan dengan membentuk tim di setiap kelasnya serta melibatkan wali kelas dan murid sebagai bentuk pencegahan agar tindak kekerasan tidak terjadi. Fungsi pelaksanaan dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh guru dan siswa dalam deklarasi anti perundungan, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta menangani tindak kekerasan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Fungsi pengawasan dilaksanakan dengan adanya bimbingan konseling berkelanjutan bagi siswa yang mengalami kekerasan maupun pelaku kekerasan sampai masalah terselesaikan dan menemukan titik terang. Selain itu, fungsi pengawasan juga melibatkan orang tua siswa untuk memberikan rehabilitasi dan mengawasi kegiatan siswa ketika di rumah.

SIMPULAN

Penyebab tindak kekerasan di SMPN 59 Kota Bandung adalah masa penyesuaian diri siswa serta bercandaan yang berlebihan. Bentuk kekerasan yang kerap terjadi hanya berupa kekerasan psikis (*mental abuse*) dan kekerasan verbal. Implentasi pencegahan tindak kekerasan yaitu dengan deklarasi anti perundungan dan membentuk agen perubahan di setiap kelasnya. Upaya penanggulangan tindak kekerasan dengan prosedur melalui guru mata pelajaran, wali kelas, guru bimbingan konseling, dan terakhir kesiswaan. Bentuk penanggulangannya melalui konseling kelompok dan pribadi untuk masalah karir, sosial, dsb.

Implementasi manajemen konflik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di SMPN 59 melalui perencanaan dengan menyusun strategi dan prosedur penanganan, pengorganisasian melalui adanya *agent of change* di setiap kelasnya, pelaksanaan melalui mengikuti pelatihan dan deklarasi, pengawasan melalui adanya konseling berkelanjutan.

Saran bagi peneliti selanjutnya, buatlah penelitian dengan subjek yang lebih khusus atau dari sudut pandang yang berbeda dan menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif agar implementasi manajemen konflik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan bisa lebih akurat dan terukur.



DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. A. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Amanda, G., & Soraya, D. A. (2023, Februari 27). *Kasus Kekerasan di Kota Bandung Tertinggi Ketiga di Jawa Barat*. Retrieved from Republika: <https://news.republika.co.id/berita/rqqsgg423/kasus-kekerasan-di-kota-bandung-tertinggi-ketiga-di-jawa-barat>. (20 Juni 2023)
- Anis, M. (2018). Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 131-140.
- Ashraf, F. F. (2021). Peran Global Maritime Distress And Safety System (GMDSS) Dalam Upaya Penanggulangan Keadaan Marabahaya dan Tindakan Penyelamatan Jiwa Dilaut Oleh Kn. SAR Sadewa 231 Pada Badan Sar Nasional (Basarnas) Semarang. *UNIMAR - AMNI*, 1-14.
- Bogdan, T. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Effendy, M. (2019). *Pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah dasar*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Fahmi, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Irwandi, & Endah. (2017). Manajemen konflik pada remaja yang Tinggal Bersama Orang Tua dan Remaja Panti di Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPO)*. Vol 7(2), 25-35.
- kemendikbud, P. w. (2023, Februari 24). *Program Roots Lahirkan Ribuan Siswa Agen Perubahan untuk Atasi Perundungan*. Retrieved from Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi: <https://kemdikbud.go.id/main/blog/2023/02/program-roots-lahirkan-ribuan-siswa-agen-perubahan-untuk-atasi-perundungan>
- Kholifatullah, U. N., Sunu, I. G., & Windari, R. A. (2013). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng. *Artikel Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, 1-16.
- Kurniawati, E. (2011). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Kriminologis) . *Jurnal Hukum Jatiswara* 26, No. 3, 75-97.
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan perubahan dalam organisasi*. Bandung: Alqaprint.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Permendikbud No. 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan satuan pendidikan
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Cet. XXI)*. Bandung: JI. Ibu Inggit Garnasih No. 40.
- Sosial, D. R.-D. (Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga: Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi terhadap Anak). 2019. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Sudarmanto, E. (2021). *Manajemen Konflik*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.



- Suradji, G., & Martono, E. (Ilmu dan Seni Kepemimpinan). 2013. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Tuwu, D. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Kendari: Literacy Institute.
- Waliah, F. M. (2021). Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pada Upt Satuan Pendidikan SMPN 1 Bontomarannu. *Article Thesis Universitas Negeri Makassar.*, 1-12.
- Wirawan. (2010). *Konflik dan manajemen; teori, aplikasi dan penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Yaqinah, S. N. (2019). Resolusi Konflik Sosial Melalui Pendekatan Komunikasi Di Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang Kota Mataram. *Jurnal Mediakita Vol 3 (1)*, 1-12.

